

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Kabupaten Bireuen ditentukan berdasarkan ketetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Berdasarkan Regulasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di Pasar Induk (Pasar Tradisional CUREH) Kabupaten Bireuen sebagai sampel pada periode triwulan I tahun 2026 (bulan Januari - Maret 2026).

Fluktuasi harga pada 33 jenis yang terdiri dari 20 jenis bahan pokok, 10 jenis barang penting dan tiga jenis komoditi unggul lainnya dengan jumlah 85 varian barang kebutuhan pokok dan barang penting serta komoditi unggul lainnya secara keseluruhan. Dalam rentang waktu bulan Januari hingga Maret 2026 di Kabupaten Bireuen dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Harga Rata-rata komoditas makanan dan minuman pada varian beras medium merk jangkar, minyak goreng kemasan, daging ayam kampung, ikan bandeng, garam yodium, kelapa bulat, ketela pohon, susu dan tepung segi tiga biru dan jagung pipil relative stabil dan tidak terdapat gejolak harga yang signifikan selama 3 (tiga) bulan terakhir. Begitu juga dengan komoditas barang penting seperti baja ringan caso, tripleks, papan 2,5x25x4m, paku, benih dan pupuk bersubsidi juga relatif stabil.
2. Komoditas yang mengalami lonjakan harga rata-rata tertinggi dan cenderung langka pada triwulan I periode Januari - Maret 2026 yaitu pada komoditas makanan dan minuman terutama Bawang Putih 33,99 persen (harga rata-rata bulan Januari 2026 Rp34.000,- menjadi Rp37.120,- bulan Maret 2026), tomat 30,07 persen (harga rata-rata bulan Januari 2026 sebesar Rp11.117,- meningkat signifikan menjadi Rp15.150 rata rata pada bulan Februari 2026). Biji Kopi Arabica 20,84 persen (harga rata -rata bulan Januari 2026 Rp11.583,- meningkat menjadi Rp140.500,- bulan Februari 2026), Daging Sapi tetelan 8,33 persen (harga rata -rata bulan Januari 2026 Rp60.000,- meningkat menjadi Rp65.000,- pada bulan Maret 2026). Minyak Goreng CUREH yaitu 7,22 persen (harga rata -rata bulan Januari 2026 Rp17.325,- meningkat menjadi Rp18,576,-pada bulan Maret 2026). Gula Pasir yaitu 6,59 Persen (harga rata-rata bulan Januari 2026 Rp18.292,- meningkat menjadi Rp19.560,- pada bulan Maret 2026). Sedangkan untuk komoditas seperti gas LPG 3 kg, besi beton, dan kemiri kupas cenderung meningkat harganya hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana banjir dan tanah long pada 26 November 2025
3. Di sisi lain, komoditas yang mengalami penurunan harga rata-rata pada triwulan I tahun 2026 yaitu Bawang Peking yaitu 38,41 persen (harga rata-rata bulan Januari 2026 sebesar Rp38.417,- menurun signifikan menjadi Rp30.080,- rata rata pada bulan Maret 2026). Kol/Kubis 37,76 persen (harga rata-rata bulan Januari 2026 Rp11.375,- turun menjadi Rp7,080,- pada bulan Maret 2026),

Wortel yaitu 25,70 persen (harga rata-rata bulan Januari 2026 Rp12.000,- turun menjadi Rp8.916,- pada bulan Maret 2026). Ikan Kembung yaitu 20 persen (harga rata-rata bulan Januari 2026 Rp50.000,- turun menjadi Rp40.000,- pada bulan Maret 2026). Minyak Goreng Minyakkita yaitu 18,17 persen (harga rata-rata bulan Januari 2026 Rp19.250,- turun menjadi Rp15.752,- pada bulan Maret 2026). Ikan Tongkol menurun 17,07 persen (harga rata-rata bulan Januari 2026 Rp47.750,- turun menjadi Rp39.600,- bulan Maret 2026). Buncis turun 15,96 persen, cabai rawit hijau turun 14,50 persen, kentang turun 13,32 persen, cabai merah keriting turun 11,16 persen. Biji kopi Robusta turun 10,88 persen, ikan tuna segar turun 6,93 persen, beras medium cap bunga turun 6,82 persen, Beras Premium merk JK turun 6,41 persen, Beras Premium merk AB dan Cap panah juga turun masing masing 3,20 persen dan 2,59 persen. Sedangkan komoditas BBM dan Gas khususnya Gas LPG 12 kg turun hingga 8,37 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K pada periode Triwulan I Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

1. Terganggunya pasokan perikanan akibat kondisi cuaca ekstrim , pasca bencana banjir dan tanah longsor menyebabkan hasil tangkapan menurun, gagal panen dan rusaknya tambak di kabupaten Bireuen.
2. Tergangguaya pasokan pangan terutama, cabai merah, bawang merah telur disebabkan karena putusnya jalur distribusi dari sentra produksi, terjadinya kerusakan lahan/tanaman, penurunan sedangkan permintaan meningkat pasca bencana Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen.
3. Terganggunya pasokan pangan komoditas beras disebabkan banyaknya permintaan beras untuk penanggulangan bencana, jalur distribusi putus, lahan dan sarana prasarana (irigasi) pertanian padi rusak.
4. Terganggunya jaringan Air bersih minum, akibat terjadinya bencana banjir dan tanah longsor menyebabkan susahnya air bersih di Kabupaten Bireuen.
5. Komoditas bahan pangan di Kabupaten Bireuen sangat tergantung dari suplay dari daerah lain, misalnya Sumatra Utara dan Kabupaten Aceh Tengah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen Pada triwulan I tahun 2026 dikaitkan dengan strategi 4K yaitu (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif) Pengendalian Inflasi sebagai berikut:

1. Bupati Bireuen mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan menaikkan harga barang secara tidak wajar serta menahan stok barang dalam menghadapi situasi Bencana Banjir dan tanah Longsor di Kabupaten Bireuen, nomor 300.2.2/1331 tahun 2025 pada tanggal 30 November 2025 dan berlaku sampai dengan

sekarang;

2. TPID Kabupaten Bireuen melakukan Rapat Koordinasi terkait tinjau Zoom Meeting dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Saber Pelanggaran Harga, keamanan dan mutu pangan pada tanggal 10 Februari 2026 di pimpin oleh Kanit Tipiter Polres Bireuen;
 3. TPID Kabupaten Bireuen bersama Satgas Saber Pelanggaran Harga keamanan dan mutu pangan harga melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pasar/Distributor terkait kelangkaan dan kenaikan harga barang dan mutu pangan dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan di seluruh Indonesia menjelang Ramadhan 1447 H pada tanggal 11 Februari 2026;
 4. Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) dan Pertamina Aceh terkait permintaan penambahan kuota BBM sebagai tindaklanjut pengendalian kelangkaan BBM di Kabupaten Bireuen;
 5. Pemerintah Kabupaten Bireuen melakukan penyediaan jasa angkutan air (boat penyeberangan) untuk memperlancar distribusi logistic, angkutan orang sebagai tindaklanjut dari pengendalian putusnya jalur distribusi darat dengan berkolaborasi dengan TNI/POLRI;
 6. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyediaan air minum dan air bersih;
 7. TPID Bireuen melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen melakukan Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pengencer setiap hari kerja di Pasar Induk Kabupaten Bireuen.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi di Bireuen berfokus pada strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), dengan program yang terlihat aktif di lapangan

1. Pemerintah Kabupaten Bireuen Telah melakukan Pemetaan lahan pertanian yang rusak dengan klasifikasi rusak ringan dan sedang melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta telah memulai proses pembersihan lahan dari material lumpur dan sisa banjir;
2. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan Distributor untuk memantau harga, untuk memastikan stabilitas harga terkendali, menjamin ketersediaan pasokan dan mencegah praktik penimbunan barang oleh distributor dalam menghadapi bencana banjir dan ranah longsor yang dapat mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan masyarakat atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Bireuen;

Indikasi adanya ketidakseimbangan *supply* dan *demand* harus didukung oleh ketersediaan data neraca pangan secara berkala;

4. Menambah jaringan alternatif pemasok yang terjangkau sehingga meningkatkan efisiensi distribusi dan kebutuhan stok barang;
5. Perlu peningkatan kerjasama dan keterlibatan semua pihak terkait untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Bireuen.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bireuen dari yang diterangkan diatas antara lain dapat berupa :

1. Normalisasi infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan dan akses pasar yang rusak akibat banjir/longsor supaya logistik berjalan lancar. Ini mencegah berkurangnya pasokan yang bisa mendorong inflasi.
1. Perlu memaksimalkan Rehabilitasi Lahan Pertanian dan Infrastruktur Irigasi yang terdampak Banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen untuk mengantisipasi terjadinya potensi defisit produksi beras lokal di periode mendatang jika rehabilitasi tidak rampung tepat waktu.
2. Melakukan rapat koordinasi secara aktif, rutin/berkala guna membahas dan mengkoordinasikan upaya-upaya pengendalian inflasi sehingga dapat meningkatkan komunikasi aktif yang dapat mempererat kerjasama antar lintas sektor; pasca bencana banjir dan tanah longsor di kabupaten Bireuen;
3. Melakukan pemantauan pasokan komoditas secara rutin/berkala dan memastikan validitas data surplus-defisit komoditas barang kebutuhan pokok/penting;
4. Penguatan bantuan pangan melalui skema penyaluran bantuan beras SPHP ke 17 kecamatan terdampak bencana berkolaborasi dengan Bulog untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan harga terjangkau bagi masyarakat terdampak;
5. Pemulihan ekonomi pasca bencana mesti selaras dengan langkah mitigasi bencana seperti perbaikan drainase, penguatan tanggul, dan peringatan dini sehingga gangguan pasokan dan distribusi bisa dikurangi di masa datang di kabupaten Bireuen;
6. Meningkatkan pemberdayaan produksi pangan lokal di daerah yang tidak terdampak bencana terutama gerakan menanam komoditas pangan di halaman rumah atau di lahan cadangan agar pasokan lokal meningkat;
7. Pemenuhan data dan informasi yang *realtime* terkait harga dan kebutuhan stok barang pangan strategis maupun barang kebutuhan pokok dan penting sangat dibutuhkan sebagai *early warning* bagi pemerintah dalam merumuskan Kebijakan pengendalian Inflasi pasca bencana banjir dan tanah longsor;
8. Perlu adanya program atau kegiatan yang menyasar pedagang enceran/distributor/agen/tengkulak terkait proses penetapan harga bahan kebutuhan pokok/penting di Kabupaten Bireuen;

Inspektur Kabupaten Bireuen melalui Aplikasi APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) menyampaikan laporan secara rutin setiap hari kerja kepada Kementerian dalam Negeri dalam rangka pengendalian inflasi di Daerah.